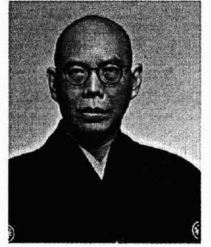


Gereja Jepang untuk Indonesia (1942-1945)



Romo Lili Tjahjadi
Dosen STF Driyarkara,
Jakarta

MUNGKIN tidak banyak orang mengetahui, bahwa Gereja Katolik Jepang telah amat membantu kehidupan Gereja Katolik di Indonesia (dahulu: Hindia Belanda) di masa sulit saat pendudukan Jepang antara tahun 1942-1945. Hal ini menjadi semakin menarik, justru jika dilihat, bahwa umat Katolik di Jepang pada masa itu tengah mengalami kesulitan dan tekanan lantaran pemerintahnya saat itu sedang giat-giatnya melakukan gerakan niponisasi yang pada gilirannya mencurigai Gereja Katolik sebagai pihak asing bahkan musuh. Ada pembatasan kegiatan wartawan dan personalia non-jepang di sana. Semuanya harus selaras dan memberi dukungan pada pemerintah.

Tetapi meskipun sendiri mengalami kesesakan, panggilan zaman membuat Gereja Jepang membantu Gereja di Indonesia, semula memang dalam rangka kebijakan militer negara Matahari Terbit ini, namun tidak bisa dipungkiri ini terjadi dalam ketulusan, solidaritas dan kasih kepada sesama umat Allah.

Kebijakan perihal Agama

Secara formal, sikap Jepang terhadap agama diatur menurut “Prinsip-prinsip Mengenai Pemerintahan Militer di Wilayah Pendudukan” (*senryōchi gunsei fīsshi yōkō*), 14 Maret 1942, yang berbunyi: “Agama-agama, sebagaimana kebiasaan yang ada dan berlaku, harus dihormati sejauh mungkin untuk menjaga kestabilan pikiran rakyat dan membuat mereka mau bekerja sama.” (A. Kurasawa, *Masyarakat dan Perang Asia Timur Raya*, 2016). Jepang memperlakukan agama-agama secara instrumentalistis dan manipulatif. Artinya, agama-agama hanya diperhatikan sejauh membantu kepentingan Jepang dan bekerja sama dengan tujuan propagandanya. Sebaliknya: agama akan ditindas, sejauh ia dinilai sebagai musuh yang membahayakan kepentingan Jepang.

Tetapi terhadap mayoritas orang Indonesia yang beragama Islam, Jepang memiliki sikap lain. Maka di dalam kebijakan di atas ada tambahan khusus untuk

sikap terhadap Islam: “*Mengenai kaum muslim, harus diberikan perhatian khusus untuk memanfaatkan mereka dalam rangka mencengkram pikiran rakyat.*” Istilah “mencenggram pikiran rakyat” di sini searti dengan “menguasai dan memakai” rakyat untuk kepentingan propaganda Jepang. (Kurasawa, 2015).

Berbeda terhadap Islam, sikap Jepang terhadap terhadap agama Kristen – baik Katolik maupun Protestan – sangat keras dan brutal, sebab agama ini dianggap sebagai agama pihak musuh. Contoh paling jelas dari sikap brutal ini adalah eksekusi atas Mgr. Aerts dan dua belas anggota Tarekat Hati Kudus (MSC) di Langgur, Kepulauan Kei, 30 Juli 1942. Selain itu salah satu kekhasan pendudukan *Dai Nippon* di Indonesia adalah bahwa mereka menginternir semua warga musuh, baik kombatan maupun sipil, termasuk para misionaris, perempuan dan anak-anak. Dengan sarana dan perbekalan seadanya, mereka semua dimasukkan ke dalam kamp tawanan oleh Jepang yang mau memblokir kegiatan mata-mata dan pemberontakan pada tingkat sekecil apa pun.

Meskipun demikian, di daerah-daerah di mana mayoritas penduduknya beragama Kristen, terutama di Indonesia bagian Timur, Jepang berusaha tampil “simpatik”. Sama seperti terhadap Islam, Jepang mencoba mengambil hati umat kristiani dengan mengirim tim pendeta protestan dan rombongan Klerus Katolik.

Rombongan Klerus Jepang

Menjawab permintaan pimpinan militer Jepang di Indonesia, Ketua Majelis Waligereja Jepang, Mgr. Tatsuo Doi (Uskup Agung Tokyo) mengirim imam-imam Jepang ke Indonesia. Hasilnya, delapan klerus Jepang dikirim ke Indonesia dalam datum yang berbeda 1943-1945. Para imam dari Jepang ini akan berfungsi sebagai “satuan religius untuk misi perdamaian” (*shūkyō senbuhan yōin*) dengan memberikan pelayanan rohani bagi umat Katolik di Indonesia, terutama di daerah mayoritas katolik.

“
Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), misi mengalami krisis berat, khususnya menyangkut hal finansial dan personalia.”

NO	NAMA	KEUSKUPAN	EFEKTIF BERTUGAS	TUJUAN
1	Mgr. Yamaguchi Aijirō	Nagasaki	5 Agustus 1943	Flores
2	Mgr. Ogiwara Akira, SJ	Hiroshima (Administrator Apostolik)	5 Agustus 1943	Flores
3	R.D. Kyono Shigeru	Yokohama	Agustus 1943	Flores
4	R.D. Iwanaga Rokuro	Nagasaki	Agustus 1943	Flores
5	P. Koide Tetsuo, SJ	Ordo Serikat Yesus	September (tahun?)	Jawa
6	R.D. Kobayashi Arikata	Osaka	Tak ada catatan	Makassar
7	R.D. Taniguchi Kenji	Yokohama	Juni 1944	Makassar
8	R.D. Nakagawa Toshi	Sapporo	Juni 1944	Sulawesi a.l. Manado

Ini eufemisme. Yang sebenarnya dimaksudkan oleh pemerintah Jepang adalah agar mereka menjinakkan hati orang Indonesia agar bisa dimobilisasi oleh Jepang demi kepentingan militernya.

Tapi dalam kenyataannya mereka semua bekerja sebagai pelayan sakramen dan pastoral umat yang tulus. Tidak ada kesan, mereka bekerja demi militer, lewat kegiatan spionase atau propaganda, misalnya. P. Koide, SJ bekerja di Pulau Jawa dengan berpindah-pindah kota. Dia berusaha memberi pelayanan pastoral kepada umat katolik di pulau ini. Sementara R.D. Kobayashi, seorang pembicara ulung (kelak sesudah perang, ia menjadi uskup di Keuskupan Sendai dan pendukung Gerakan Kharismatik Katolik) melakukan hal yang sama di Makassar dan sekitarnya. Tidak ada informasi menyangkut R.D. Taniguchi yang juga ditugaskan ke Makassar, sementara R.D. Nakagawa amat diterima baik oleh umat di daerah Minahasa. Sambutan dan kemeriahannya yang sama juga ia alami saat 1990-an ia mengunjungi daerah pelayanannya saat perang ini.

Sebuah Kekhususan

Kendati mengalami aneka kepahitan perang, kehidupan Gereja di Flores tetap bisa terus dilanjutkan berkat adanya kerjasama dari tiga pihak. Mereka adalah Tim Klerus dari Jepang di bawah pimpinan Mgr. Yamaguchi, bersama Mgr. Ogiwara dan kedua imam praja Jepang, R.D. Iwanaga dan R.D. Kyono yang berperangai halus.

Semula Jepang memaksudkan mereka untuk menggantikan Mgr. Leven dan beberapa imam yang akan diinternir ke Makassar. Tetapi demi mengetahui bahwa Mgr. Leven ternyata masih ada di sana, Mgr. Yamaguchi mengambil sikap tegas dan menolak menggantikan posisi Mgr. Leven itu dengan alasan: menggantikan Uskup bukanlah wewenang Jepang atau Belanda, melainkan sepenuhnya hak Tahta Suci. Militer Jepang tidak boleh melakukan ini, dan ia tolak atas nama suara hatinya. Ini sikap jelas dari seorang Uskup yang mengerti segala konsekuensi dari penolakan atas perintah pimpinan militer setempat. Tapi untunglah pimpinan militer itu yang bernama Kolonel Sato (kelak setelah perang usai, ia menjadi Katolik) bisa diyakinkan oleh Mgr. Yamaguchi. Akibatnya, Mgr. Leven dkk tidak adi diinternir di Makassar.

Akibatnya, di Vikariat Ende terjadi hal menarik. Sementara di tempat lain para uskup Eropa ditawan, di sini Mgr. Leven dan beberapa imam yang masih ada malah boleh bekerja dan bergerak leluasa. Bahkan kini ada tambahan tenaga baru dari Jepang, yakni dua uskup dan dua imam Jepang. Mgr. Yamaguchi bahkan dengan otoritasnya melarang pemerintah Jepang melakukan sesuatu kepada imam dan Gereja di Keuskupan Ende itu, tanpa terlebih dahulu berbicara dengannya.

Pesan untuk Keindonesiaan

Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), misi mengalami krisis berat, khususnya menyangkut hal finansial dan personalia. Semua warga Belanda, termasuk imam dan suster diinternir. Di sini dicatat juga dengan rasa getir adanya banyak korban dari kalangan pelayan Gereja, terutama orang Belanda: 74 imam, 47 bruder dan 161 suster meninggal di tempat-tempat tahanan. Yang bisa bergerak lebih leluasa adalah para pelayan Gereja yang pribumi, yakni Mgr. Soegijapranata, 19 imam, 60 bruder dan 206 suster. Di sini harus disebut juga tampilnya banyak awam (sering tanpa nama) yang tampil sebagai gembala bagi sesamanya, tanpa imbalan apa pun, meskipun sendiri menderita dan harus sulit bekerja.

Sejarahwan Muskens (*Partner in Nation Building* 1979) menulis: *"Bagi banyak orang Indonesia baik yang Katolik maupun yang non-katolik, pasti dalam tahun-tahun itu sudah menjadi jelas, bahwa menjadi Katolik tidaklah identik dengan menjadi orang Barat. Bukan hanya Uskup mereka di Semarang, imam-imam, para bruder dan suster dari kalangan mereka saja tetap masih bekerja dan merawat iman seperti seperti telah mereka jalankan selalu, namun kini seorang Uskup Jepang dan imam-imam Jepang pun (artinya: bukan orang Katolik Barat!, Pen) ternyata toh bekerja dan berkotbah persis seperti dijalankan juga oleh rohaniwan Indonesia kini, dan juga oleh imam-imam dan uskup-uskup Belanda sebelumnya."* Yang disebut terakhir adalah rombongan klerus Jepang di bawah pimpinan Mgr. Yamaguchi, khususnya di Flores. Di sini seperti juga di tempat lain, universalitas dan solidaritas Gereja Katolik dialami secara nyata: Indonesia, Jepang, dan Belanda! ●